

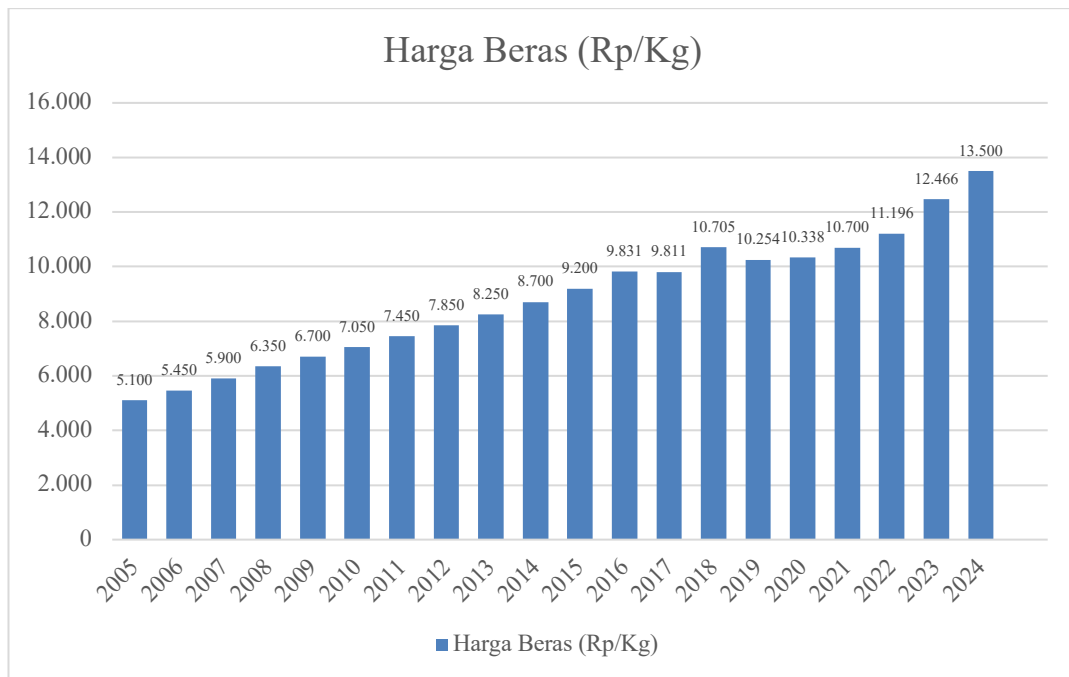
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya pada industri pertanian. Akibatnya, industri pertanian menjadi sangat penting, terutama untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kebutuhan pokok terpenting di Indonesia adalah beras. Kebutuhan akan kebutuhan pokok selalu meningkat di Indonesia dari tahun ke tahun dikarenakan jumlah penduduk yang juga meningkat. Beras memang sudah menjadi makanan pokok yang dapat dilihat tetap mendominasi pola makan orang Indonesia sendiri. Pada tingkat internasional Indonesia termasuk salah satu produsen beras terbesar setelah China. Hal ini dapat menjadikan penduduk Indonesia untuk lebih meningkatkan produksi beras di Indonesia agar menjadi stabil. Dengan stabilnya produksi tersebut dapat menjaga ketahanan bahan pangan nasional dan kestabilan harga pangan juga dapat terjaga (Rozaini, 2023).

Impor beras yang terjadi secara fluktuatif setiap tahun tanpa mempertimbangkan peningkatan produktivitas beras di Indonesia akan menyebabkan ketergantungan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri. Harga beras impor yang murah akan berpengaruh pada harga beras dalam negeri menjadi murah, turunnya harga beras inilah yang menjadi tujuan pemerintah. Harga beras yang murah akan meringankan konsumen namun di sisi lain kebijakan ini akan merugikan petani. Turunnya harga beras mengakibatkan tidak terpenuhinya biaya produksi pertanian, sehingga produktivitas pertanian menurun dan mengurangi

produksi pertanian. Akan sangat beresiko tinggi apabila ketersediaan pangan harus selalu bergantung pada impor (Siringo dan Daulay, 2024).



Gambar 1. 1 Diagram Harga Beras (Kg) di Indonesia 2005-2024

Stabilitas dan tingkat harga beras akan memengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap pangan beras. Bahan pangan perlu selalu tersedia dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak dan secara medis aman dikonsumsi. Ketersediaan bahan pangan pokok terutama beras dipengaruhi oleh besarnya produksi padi atau beras di suatu daerah. Di Indonesia, produksi beras terus meningkat dari tahun ke tahun. Ketidakstabilan harga beras di Indonesia terlihat dari semakin besarnya disparitas harga antara harga beras Indonesia dengan harga beras internasional. Tingkat fluktuasi harga beras di Indonesia cukup tinggi setiap tahunnya, hal ini berarti harga beras cenderung tidak stabil terutama harga beras di pulau-pulau yang defisit beras seperti Pulau Maluku dan Papua. Harga yang tidak stabil akan merugikan baik di

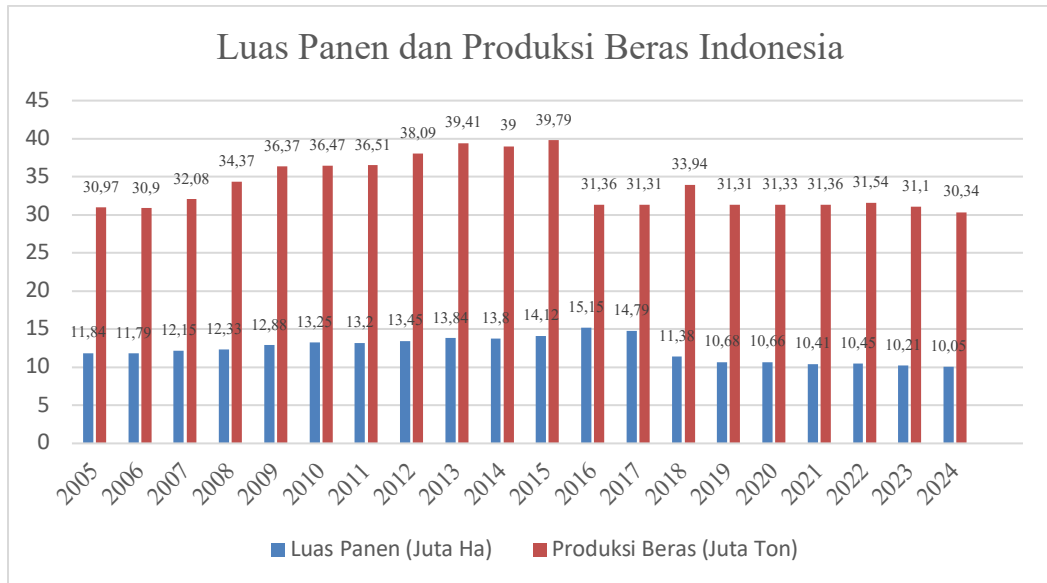
tingkat petani maupun konsumen. Harga yang relatif stabil dan dijaga kewajarannya bagi produsen dan konsumen, akan lebih memberikan kepastian penghasilan dan insentif berproduksi pada petani dan sekaligus menjaga kelangsungan daya beli konsumen (Aryani, 2021).

Salah satu faktor yang mempengaruhi impor beras di Indonesia adalah produksi beras dalam negeri. Tingkat produksi beras yang dimiliki Indonesia lebih besar dibandingkan dengan tingkat konsumsi. Dengan demikian seharusnya Indonesia tidak mengalami kekurangan beras untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri. Namun yang terjadi Indonesia masih mengimpor beras dari luar negeri. Pemerintah seharusnya mengantisipasi agar hal ini tidak terjadi, karena akan berdampak negatif terhadap petani. Dampak negatif dari kebijakan impor beras tersebut adalah menurunnya kesejahteraan petani dalam negeri, karena harga jual beras akan menurun atau menjadi lebih murah. Petani yang seharusnya mendapatkan keuntungan karena tingginya produksi beras justru mengalami kerugian. Selain itu perubahan iklim yang memicu serangan hama dan terus berkurangnya lahan pertanian diperkirakan akan menyebabkan kemerosotan hasil panen. Hal ini yang menjadi alasan pemerintah kembali membuka kran impor beras demi menjaga ketersediaan beras dalam negeri (Daulay, 2023).

Beras merupakan salah satu komoditas penting dalam sendi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Posisi komoditas beras bagi sebagian besar penduduk Indonesia adalah sebagai makanan pokok karena hampir seluruh penduduk Indonesia membutuhkan beras sebagai bahan makanan utamanya disamping merupakan sumber nutrisi penting dalam struktur pangan, sehingga aspek penyediaan menjadi hal yang sangat penting mengingat jumlah penduduk

Indonesia yang sangat besar. Pengenalan komoditi beras kepada masyarakat bukan pegkonsumsi nasi telah mengakibatkan permintaan beras mengalami peningkatan sepanjang tahun. Masyarakat Papua yang sebelumnya adalah pegkonsumsi sagu sebagai makanan utama, saat ini telah terbiasa dengan konsumsi nasi dalam keseharian mereka, begitu juga dengan masyarakat Maluku, Sulawesi Utara, Madura dan sebagainya (Jiuhardi, 2023).

Salah satu komoditas pangan yang sering diimpor Indonesia adalah beras. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), volume impor beras Indonesia selama periode 2005–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup besar dari tahun ke tahun. Perubahan impor beras tersebut dipengaruhi oleh kondisi produksi dalam negeri, luas panen, produktivitas, pertumbuhan penduduk, serta tingkat konsumsi masyarakat. Selama periode 2005–2024, luas panen dan produksi padi di Indonesia juga mengalami peningkatan dan penurunan yang dipengaruhi oleh kondisi iklim, alih fungsi lahan, serta kebijakan pertanian pemerintah. Meskipun Indonesia merupakan salah satu negara produsen beras terbesar di dunia, produksi beras domestik belum selalu mampu memenuhi kebutuhan nasional sehingga pemerintah masih melakukan impor beras pada beberapa periode tertentu untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di dalam negeri. Pada tahun 2024, luas panen padi Indonesia tercatat sekitar 10,05 juta hektare dengan produksi padi sebesar 52,66 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara sekitar 30,34 juta ton beras, yang menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2023. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi kebijakan impor beras di Indonesia.



Gambar 1. 2 Grafik Luas Panen Dan Produksi Beras di Indonesia Tahun 2005-2024

Berdasarkan data luas panen padi Indonesia periode 2005–2024, luas panen menunjukkan pola yang berfluktuasi. Pada beberapa tahun terjadi peningkatan luas panen, namun pada periode berikutnya mengalami penurunan akibat berbagai faktor yang memengaruhi sektor pertanian. Penurunan luas panen padi antara lain disebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian ke sektor nonpertanian, perubahan iklim, tingginya curah hujan, kekeringan, serta pergeseran penggunaan lahan untuk komoditas pertanian lainnya yang dianggap lebih menguntungkan. Perubahan luas panen tersebut berdampak langsung terhadap produksi padi nasional sehingga produksi beras Indonesia cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

Wilayah penghasil padi terbesar di Indonesia masih didominasi oleh Pulau Jawa yang secara konsisten memberikan kontribusi lebih dari 50 persen terhadap total produksi padi nasional. Provinsi-provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat menjadi sentra utama produksi padi nasional. Selain itu, beberapa provinsi di luar Pulau Jawa seperti Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Lampung juga berperan penting dalam mendukung produksi padi nasional.

Perbedaan kondisi geografis, luas lahan pertanian, teknologi budidaya, serta kebijakan pemerintah daerah menyebabkan tingkat produksi padi antarprovinsi berbeda-beda dan turut memengaruhi ketersediaan beras nasional. (Danila, 2022). Pembangunan sektor tanaman pangan memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung keberlanjutan pembangunan nasional, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun politik. Komoditas tanaman pangan utama di Indonesia meliputi padi, jagung, dan kedelai. Di antara ketiga komoditas tersebut, padi memiliki peran yang sangat penting karena beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Ketergantungan masyarakat terhadap beras menjadikan komoditas ini tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan politik yang tinggi. Ketersediaan dan stabilitas harga beras menjadi perhatian utama pemerintah karena berkaitan langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, inflasi, serta ketahanan pangan nasional (Carolina dan Sirait, 2018).

Tingginya tingkat konsumsi beras masyarakat Indonesia menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kebutuhan pasokan beras nasional. Selama periode 2005–2024, konsumsi beras per kapita masyarakat Indonesia cenderung mengalami penurunan secara bertahap seiring dengan program diversifikasi pangan yang dijalankan pemerintah. Namun demikian, beras tetap menjadi sumber pangan utama bagi mayoritas penduduk Indonesia. Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan beras nasional tetap tinggi meskipun konsumsi per kapita menunjukkan tren menurun. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah menjaga keseimbangan antara produksi domestik, cadangan beras nasional, dan kebijakan impor guna memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat serta menjaga stabilitas harga beras di pasar domestik.

Tabel 1. 1 Proyeksi Jumlah Penduduk di Indonesia Tahun 2005-2024

No	Tahun	Jumlah Penduduk Indonesia (Juta Jiwa)
1	2005	219.852.000
2	2006	222.192.000
3	2007	224.642.000
4	2008	227.345.000
5	2009	230.271.000
6	2010	237.641.326
7	2011	241.031.390
8	2012	244.470.839
9	2013	247.910.422
10	2014	251.268.276
11	2015	254.455.778
12	2016	257.912.349
13	2017	261.355.500
14	2018	264.161.600
15	2019	266.911.900
16	2020	270.203.917
17	2021	272.682.518
18	2022	275.773.800
19	2023	278.696.200
20	2024	281.603.800

Sumber : Badan Pusat Statistik jumlah penduduk di Indonesia Tahun 2005-2024

Jumlah penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 281,6 juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk tersebut berdampak pada meningkatnya kebutuhan pangan nasional, khususnya beras sebagai makanan pokok utama masyarakat Indonesia. Meskipun konsumsi beras per kapita cenderung mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir akibat program diversifikasi pangan, total kebutuhan beras nasional tetap tinggi karena pertumbuhan jumlah penduduk yang terus berlangsung. Di sisi lain, produksi beras dalam negeri mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti luas panen, produktivitas lahan, kondisi iklim, serta kebijakan pemerintah di sektor pertanian. Ketika produksi

domestik tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dan cadangan beras nasional secara optimal, pemerintah dapat melakukan impor beras sebagai salah satu upaya untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di pasar domestik. Namun, peningkatan impor beras yang dilakukan secara berkelanjutan berpotensi menimbulkan ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri sehingga diperlukan upaya peningkatan produksi dan produktivitas beras dalam negeri guna memperkuat ketahanan pangan nasional.

Mayoritas masyarakat Indonesia mengonsumsi beras, mendorong Indonesia menjadi negara terbesar di dunia dalam mengonsumsi beras. Kondisi tersebut menjadi salah satu latar belakang mengapa Indonesia pernah melakukan impor beras meskipun dikenal sebagai negara produsen beras. Tidak dapat dipungkiri, jumlah penduduk yang terus meningkat disertai dengan tingginya tingkat konsumsi menjadi salah satu faktor yang mendorong kebutuhan impor beras pada periode tertentu ketika produksi dalam negeri belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan nasional.

Dengan meningkatnya produksi beras di Indonesia, pemerintah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan beras dalam negeri secara mandiri. Meskipun Indonesia merupakan salah satu negara penghasil beras terbesar di dunia, pada berbagai periode pemerintah masih melakukan impor beras untuk menjaga stabilitas pasokan dan memenuhi kebutuhan nasional. Sejarah menunjukkan bahwa sejak masa Orde Lama hingga Orde Baru, Indonesia beberapa kali melakukan impor beras, meskipun pernah berhasil mencapai swasembada beras. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan impor beras tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat produksi, tetapi juga oleh berbagai faktor seperti ketersediaan stok, kondisi iklim,

serta dinamika permintaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur kegiatan impor beras melalui berbagai kebijakan yang berlaku, salah satunya diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Beras.

Pemerintah pada beberapa periode melakukan impor beras sebagai salah satu upaya untuk memperkuat cadangan beras nasional serta menjaga stabilitas pasokan dan harga di dalam negeri. Selain itu, impor beras juga dilakukan ketika terjadi ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan beras di beberapa wilayah. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh terhambatnya distribusi pasokan, menurunnya luas panen akibat cuaca ekstrem, maupun faktor lain yang memengaruhi produksi beras. Akibatnya, beberapa provinsi seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, sebagian wilayah Papua Barat, dan Papua pernah mengalami defisit beras sehingga memerlukan pasokan tambahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Situasi inilah yang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan impor beras.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan jumlah produksi, konsumsi dan impor beras di Indonesia?
2. Apa Saja Faktor-faktor yang mempengaruhi impor beras di Indonesia?
3. Bagaimana Implikasi Kebijakan Pemerintah terhadap Impor Beras di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi perkembangan jumlah, produksi, konsumsi, import beras di Indonesia
2. Menganalisis faktor-faktor mempengaruhi impor beras di Indonesia
3. Menganalisis implikasi kebijakan pemerintah terhadap impor beras di Indonesia

1.4. Manfaat Penelitian

Dari setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberi manfaat dari penulis maupun pihak lain yang membutuhkan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan dan pengelolaan dalam hal impor beras di Indonesia
2. Bahan referensi dan informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut dalam masalah yang sama dimasa yang akan datang.